

RINGKASAN

ETJUNG WIDHIARTO, Program Studi Ilmu Administrasi-Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, Studi Formulasi Kebijakan Kartu Banyumas Sehat di Kabupaten Banyumas, Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. Slamet Rosyadi, M.Si, Anggota: Dr. Denok Kurniasih, M.Si.

Kesehatan merupakan indikator universal pembentuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap warga negara dijamin haknya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang bermartabat. Faktanya, keterbatasan pemerintah pusat menyebabkan banyak masyarakat khususnya masyarakat miskin tidak mendapatkan layanan kesehatan. Di Kabupaten Banyumas terdapat 889.264 masyarakat miskin dan 298.457 jiwa diantaranya tidak memiliki jaminan kesehatan. Seiring dengan desentralisasi, pemerintah daerah meresponnya dengan membuat kebijakan jaminan kesehatan daerah. Bahkan, pada beberapa daerah jaminan kesehatan dijadikan sebagai program populis untuk memenangkan pilkada. Salah satunya adalah program Kartu Banyumas Sehat (KBS) yang digunakan oleh pasangan Husein-Budhi untuk memenangkan pilkada Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan Kartu Banyumas Sehat. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori *multiple streams* John W. Kingdon sebagai *guide line theory* formulasi. Teori tersebut terdiri atas arus masalah (*problem stream*), arus kebijakan (*policy stream*), dan arus politik (*political stream*). Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan sampel bertujuan.

Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa formulasi Kebijakan Kartu Banyumas Sehat didorong oleh arus politik dari *policy entrepreneur* (PE). Adapun aktor yang berlaku sebagai PE adalah Bupati dan Wakil Bupati terpilih. PE mendorong permasalahan akses jaminan kesehatan dengan membentuk opini publik dan kewenangan politik yang dimilikinya. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat ditemukan pula jika masing-masing arus dalam teori formulasi Kingdon tidak murni independen dan bergerak simultan, karena *political stream* yang kuat mampu mendorong *problem* dan *policy stream*. Konsekuensinya, PE lebih dominan menggunakan arus politik untuk membuka *policy window*.

Berdasarkan hasil yang ditemukan dalam penelitian ini, maka beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan bagi setiap stakeholder dalam proses formulasi antara lain: (1) Setiap stakeholder berkewajiban membuka ruang-ruang diskusi untuk menampung gagasan dan kontrol melalui seminar, diskusi publik, maupun *public hearing*, (2) Membangun transparansi publik dalam setiap tahapan formulasi seperti sidang terbuka atau bekerjasama dengan media, (3) Menempatkan peran akademisi melalui kajian ilmiah beretika sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

SUMMARY

ETJUNG WIDHIARTO, Public Administration-Post Graduate Program, Jenderal Soedirman University, Policy Formulation Study of Banyumas Health Card in Banyumas, Supervisor Commision, Supervisor: Dr. Slamet Rosyadi, M.Si, Co-supervisor: Dr. Denok Kurniasih, M.Si.

Health is an universal indicator of public welfare. Therefore, every citizens is guaranteed their right to get healthness services. In fact, because of the limitation central government, many society especially the poor haven't get it. Example, there are 298.457 of 889.264 poor people in Banyumas do not have health insurance. Meanwhile, in decentralization era, many local government respond that problem by making the local health insurance policy. Moreover, health insurance is used as populist program by some Head of Local government to win their election. Banyumas Health Card Program is local health insurance which used by Husein-Budi to win Banyumas election.

This research purpose is to analyze the policy formulation process of Banyumas Health Card. On the other hand, the researcher used the multiple streams theory of JohnW.Kingdon as guide line. It consists of the problem, policy and political streams. In addition, Qualitative method with purposive sampling is used in this research.

The results of this research found that the Banyumas Health Card policy making is driven by political stream from the policy entrepreneur (PE). The actor who acts as PE are the elected Regents and Vice Regents. PE push the health insurance access problem by forming public opinion and their political authority. Based on the results, the research found that each streams in Kingdon's theory is not pure independent and simultaneous, because the political stream is the strongest stream which influence and push the other streams. Consequently, PE could use the political stream dominantly to open policy window.

Based on the result, there are three recommendation for every actors in policy making. First, opening some public sphere as seminar or public hearing to accomodate public idea and control some public issue. Second, transparency building in all stages policy making through mass media. Third, assign roles to academics through their research as consideration for policy making.